

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	Terwujudnya rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (Naskah Perjanjian). 3. Penandatanganan Piagam Kesiapan Pembangunan Zona Integritas. 4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 5. Pembukaan kain selubung spanduk Pembangunan Zona Integritas. 	100%	
2	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	Kesiapan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas.	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menjadi wilayah Zona Integritas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Penyampaian kebijakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas. 3. Mempublikasikan pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, banner dan radio. 	100%	

3	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang Manajemen Perubahan.	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mindset</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik.	Penyusunan tim kerja.	Tersusunnya tim kerja pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan aparat yang menjadi tim kerja. 2. Menetapkan tim kerja pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 	100%	
			Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas.	Tersusunnya rencana kerja pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas. 2. Menetapkan rencana kerja pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 3. Mensosialisasikan rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 	100%	
			Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas.	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi pembangunan Zona Integritas. 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi. 3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi. 	100%	

			Perubahan pola pikir dan budaya kerja.	Meningkatnya komitmen, pola pikir dan budaya kerja aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. 2. Menunjuk sebagian hakim dan pegawai sebagai role model. 3. Meningkatkan pelayanan satu atap dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara. 4. Menetapkan agen perubahan dengan membuat aturan pelarangan adanya pertemuan aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan pihak yang berperkara. 5. Melibatkan semua aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam pembangunan Zona Integritas. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
4	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Tata Laksana.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien serta terukur.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama.	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menerapkan SOP secara konsisten. 2. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi. 	<p>100%</p> <p>100%</p>	

			E-Office	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatunya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi. 2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIKEP, SAIBA, SIMAK BMN, dll). 3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi. 	100%	
			Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Membuat brosur, audio visual, spanduk dan banner dalam memberikan informasi kepada publik. 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 	100%	

5	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang penataan sistem manajemen SDM	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara kendari.' 3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 	100%	
			Pola Mutasi Internal.	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Menrapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal. 	100%	
			Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi. 2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 3. Mengikutkan aparatur 	100%	

					Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mendapatkan sertifikasi di bidang tugas masing-masing.		
			Penetapan Kinerja Individu.	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat penilaian kerja masing-masing aparatur Pengadilan tata Usaha Negara Kendari. 2. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya. 3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik. 4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu. 	100%	
			Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai.	Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat absensi pegawai dengan <i>fingerprnt</i> (sidik jari) yang terkoneksi dengan KOMDANAS. 2. Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar. 3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari. 	100%	

			Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	1. Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	100%	
6	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang akuntabilitas kinerja.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	Keterlibatan pimpinan.	Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. 2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja. 3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala.	100% 100% 100%	
			Pengelolaan akuntabilitas kinerja.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil. 2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART. 3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja. 4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. 5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja.	100% 100% 100% 100% 100%	

7	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang penguatan pengawasan.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	Pengendalian gratifikasi.	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kampanye publik (<i>public campaign</i>) tentang pengendalian gratifikasi. 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 	100%	
			Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pengendalian lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. 4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 	100%	
			Pengaduan masyarakat.	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pengaduan masyarakat. 	100%	

			<i>Whistle Blowing System.</i>	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan dan mempublikasikan <i>whistle blowing system</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Mengevaluasi penerapan <i>whistle blowing system</i>. 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>. 	100%	
			Penanganan benturan kepentingan.	Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. 2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan. 3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. 4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 	100%	
8	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha	Standar pelayanan.	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 	100%	

		Negara Kendari.			4. Melakukan <i>review</i> dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	100%	
			Budaya pelayanan prima.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika, dan <i>capacity building</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media. 3. Memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	100% 100% 100% 100%	
			Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. 2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka. 3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap	100% 100% 100%	

					pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.		
9	Mewujudkan indikator hasil di bidang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.	Nilai persepsi korupsi.	Terwujudnya aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang bersih dan bebas KKN.	1. Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dilaksanakan oleh instansi berwenang.	100%	
			Presentase penyelesaian TLHP.	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	1. Melakukan perhitungan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	100%	
10	Mewujudkan indikator hasil di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Nilai persepsi kualitas pelayanan.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.	1. Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.	100%	

